



DISERTASI

Judul:

**Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap
Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di
Indonesia**

Disusun oleh:

**MIA HADIATI
NIM. 208172001**

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024**

Pengesahan

Nama : MIA HADIATI
NIM : 208172001
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul Disertasi : Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia
Title : Alternative Dispute Resolution Model for Divorce Due to Child Marriage in Indonesia

Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi DOKTOR HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Juli -2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
4. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

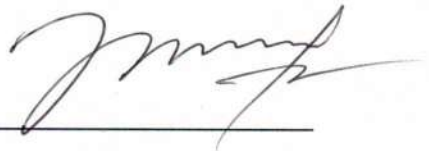
Pembimbing:

MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Pembimbing Pendamping:

AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 15-Juli-2024

Ketua Program Studi



MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

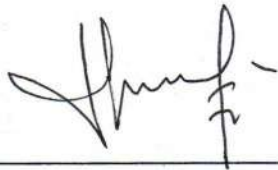
Persetujuan

Nama : MIA HADIATI
NIM : 208172001
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap
Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di
Indonesia

Disertasi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 25-Juni-2024

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Pembimbing Pendamping:
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Abstrak

Judul Disertasi : Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Perceraian Akibat Perkawinan di bawah Umur di Indonesia
Nama Mahasiswa : Mia Hadiati
NIM : 208171001
Kata Kunci : Dispensasi Kawin; Perceraian; Perkawinan di Bawah Umur

Isi Abstrak: Hampir genap lima tahun berlalu, sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan. Perubahan atas ketentuan batas usia perkawinan serta syarat-syarat pengecualiannya dalam bentuk dispensasi yang awalnya dipersepsikan akan menjadi harapan baru orientasi perkawinan yang lebih memperkuat dan memperkuat keutuhan rumah tangga, ternyata masih jauh dari kata sesuai. Permasalahan justru semakin bermunculan dengan banyaknya dispensasi kawin yang justru memiliki korelasi dengan tingginya angka perceraian di Indonesia. Penulisan ini membahas masalah relevansi antara dispensasi perkawinan dengan tingginya angka perceraian. Tujuan penulisan ini adalah untuk menemukan kondisi perceraian akibat perkawinan di bawah umur terus meningkat, upaya yang dilakukan untuk menekan jumlah perceraian akibat perkawinan di bawah umur, serta tawaran berkaitan dengan model alternatif penyelesaian sengketa terhadap perceraian akibat perkawinan di bawah umur di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan jenis penelitian empiris dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan: **Pertama**, tingginya angka perceraian di Indonesia pada secara teoretis memiliki hubungan kausalitas dengan tingginya angka dispensasi perkawinan yang menandakan juga banyaknya perkawinan di bawah umur berdasarkan faktor kekhawatiran wali akan perbuatan zina, ekonomi keluarga, pendidikan yang terputus, dan kehamilan di luar nikah. **Kedua**, upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan cara penguatan dan perlindungan hukum, optimalisasi pendidikan dan kesadaran hukum, serta dukungan pemberdayaan ekonomi. **Ketiga**, adapun model penyelesaian sengketa yang dapat digunakan adalah melalui *facilitative mediation* dan *transformative mediation*.

Abstract

Dissertation title : : Alternative Model of Dispute Resolution for Divorce
Due to Child Marriage in Indonesia.
Student name : : Mia Hadiati
NIM : : 208171001
Key Word : : Marriage dispensation; Divorce; Underage Marriage

Abstract content: Almost five years have passed, since Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage was passed. Changes to the provisions on the age limit for marriage and the conditions for exceptions in the form of dispensations, which were initially perceived to be a new hope for a marriage orientation that would further strengthen and strengthen the integrity of the household, are in fact still far from appropriate. Problems are actually increasingly emerging with the large number of marriage dispensations which actually have a correlation with the high divorce rate in Indonesia. This paper discusses the relevance of the marriage dispensation to the high divorce rate. The purpose of this writing is to find out the condition of divorce due to underage marriage continues to increase, efforts made to reduce the number of divorces due to underage marriage, as well as offers related to alternative models for resolving disputes regarding divorce due to underage marriage in Indonesia. The research method used is based on the type of empirical research with a qualitative approach. This research produces three conclusions: *Firstly*, the high divorce rate in Indonesia theoretically has a causal relationship with the high rate of marriage dispensation which also indicates that the number of underage marriages is based on the guardian's concern about adultery, family economy, interrupted education, and pregnancy out of wedlock. *Secondly*, efforts that the Indonesian government can make include strengthening and protecting the law, optimizing education and legal awareness, as well as supporting economic empowerment. *Third*, the dispute resolution models that can be used are through facilitative mediation and transformative mediation.

Pernyataan

Nama : MIA HADIATI
NIM : 208172001
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap
Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di
Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25-Juni-2024
Yang menyatakan



MIA HADIATI
NIM. 208172001

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Tanda Pengesahan Disertasi	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Kerangka Konsep	16
E. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	23
2. Metode Pendekatan	24
3. Jenis dan Sumber Data	30
4. Teknik Pengumpulan Data	30
5. Teknik Analisis Data	31
F. Sistematika Penulisan	32
BAB II LANDASAN TEORI	34
A. Negara Hukum Pancasila (<i>Grand Theory</i>)	34
1. Nilai Ketuhanan.	36
2. Nilai Kemanusiaan.	36
3. Nilai Persatuan.	36
4. Nilai Kerakyatan.	36
5. Nilai Keadilan Sosial.	37
B. Hukum Pembangunan (<i>Middle Theory</i>)	40
C. Teori Penyelesaian Sengketa (<i>Applied Theory</i>)	43
1. Konsultasi	46
2. Negosiasi	46
3. Mediasi	47

4. Konsiliasi atau Penilaian Ahli	49
D. Teori Kesejahteraan	51
E. Konsep Penyelesaian tentang Perkawinan di Bawah Umur	54
1. Pengantar	54
2. Penyelesaian dan Tujuan Hukum.....	56
3. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi).....	78
4. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)	80
5. Konsistensi Penyelesaian Perkawinan di Bawah Umur	97
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	149
A. Realita Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.....	149
B. Identifikasi Penetapan Dispensasi Kawin sebagai Sikap Hakim Terhadap Perkawinan di Bawah Umur	162
1. Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2041/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg	163
2. Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg	172
3. Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Batg.....	176
4. <i>Ratio Decidendi</i> Tiga Putusan Hasil Temuan Penelitian.....	179
C. Identifikasi Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Kawin dan Perkawinan di Bawah Umur	181
1. Faktor Kekhawatiran terhadap Hubungan Zina (Saling Mencintai)	192
2. Faktor Ekonomi dan Budaya yang Mendesak Keluarga	194
3. Faktor Jenjang Pendidikan yang Terputus	195
4. Faktor Kehamilan di Luar Nikah.....	197
BAB IV ANALISIS	199
A. Peningkatan Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia	199
B. Upaya Menekan Jumlah Perceraian Akibat Perkawinan Anak di Bawah Umur di Indonesia.....	201
1. Tantangan dan Upaya Menekan Perceraian Akibat Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Perbandingan	201
2. Upaya Menekan Jumlah Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia.....	250
3. Upaya Menekan Jumlah Perceraian Akibat Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Nilai Keadilan Sosial menurut Teori Negara Hukum Pancasila	308

4. Upaya Menekan Jumlah Perceraian Akibat Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif <i>Law as a Tool of Social Engineering</i> menurut Teori Hukum Pembangunan	317
C. Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Perceraian Akibat Perkawinan Anak di Bawah Umur di Indonesia.....	325
1. Efektivitas Mediasi dalam Perspektif Kedewasaan Usia Perkawinan	325
2. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	353
3. Model Pelaksanaan Mediasi terhadap Penyelesaian Sengketa Perceraian di Bawah Umur	389
BAB V PENUTUP	416
A. Kesimpulan	416
B. Saran.....	418
DAFTAR PUSTAKA	420

Daftar Tabel

Tabel 1 Perbandingan Jumlah Perkara Dispensasi Kawin dengan Gugat dan Talak Masuk di Pengadilan Agama Kota Malang	150
Tabel 2 Perbandingan Jumlah Perkara Dispensasi Kawin dengan Gugat dan Talak Masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	151
Tabel 3 Perbandingan Jumlah Perkara Dispensasi Kawin dengan Gugat dan Talak Masuk di Pengadilan Agama Kota Blitar.....	151
Tabel 4 Jumlah Anak Umur 19 Tahun ke Bawah di Kota Malang.....	153
Tabel 5 Jumlah Anak Umur 19 Tahun ke Bawah di Kabupaten Malang	153
Tabel 6 Jumlah Anak Umur 19 Tahun ke Bawah di Kota Blitar	154
Tabel 7 Persepsi Remaja di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan terhadap Eksistensi UU No.1 Tahun 1974.....	160
Tabel 8 Analisis Kelemahan Perma Nomor 1 Tahun 2016	358
Tabel 9 Berbagai Contoh Kendala Proses Mediasi di Berbagai Pengadilan	360
Tabel 10 Analisis Kekurangan Tiap-Tiap Model Mediasi	394

Daftar Gambar

Gambar 1 Persentase Perkawinan yang Dilakukan Di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur.....	150
Gambar 2. Diagram alur penyelesaian sengketa perceraian akibat perkawinan di bawah umur melalui mediasi fasilitatif dan mediasi trans	412